

**ANALISIS PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN  
RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**SIFA FAUZIAH  
NPM:1421030139**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN  
RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**RIA ANISYA FITRI  
NPM :1421030061**

**Program Studi : Mu'amalah**

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.  
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan (penjual dan pembeli). Pengaturan mengenai peralihan risiko dalam jual beli dijelaskan di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur tentang risiko atas barang tertentu yaitu risiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum dilakukan. Pasal 1461 KUH Perdata mengatur tentang risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan dan ukuran, yang mana risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur. Sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan dalam Pasal 1462 KUH Perdata dijelaskan bahwa sejak semula risikonya sudah dibebankan kepada pembeli. Nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi menurut hukum Islam ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai. seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata, dan bagaimana analisis pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata, dan untuk mengetahui analisis pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang Mu'amalah dan memberikan pengembangan pengetahuan di bidang mu'amalah bagi pembaca mengenai peralihan risiko dalam jual beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan Sumber Data Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Bidayatul Mujtahid jilid 3*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata terasa tidak adil karena dalam pasal-pasal tersebut risiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, sedangkan menurut pasal 1459 KUH Perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan *levering* atau penyerahan barang. Jadi selama belum di-*lever*, risiko masih harus ditanggung oleh penjual yang masih merupakan pemiliknya sampai barang diserahkan kepada pembeli. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak

ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya. Fuqaha berpendapat, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : Ria Anisya Fitri**  
**NPM : 1421030061**  
**Jurusan : Mu'amalah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 1460-1462 KUH PERDATA  
TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM  
JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP.196603301992031002**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A**  
**NIP. 195812071987031003**

**Ketua Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

---


*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

---

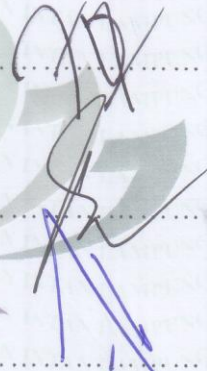
**PENGESAHAN**

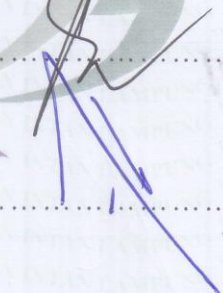
Skripsi dengan judul “ANALISIS PASAL 1460-1462 TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM”, disusun oleh Nama: **Ria Anisya Fitri, NPM: 1421030061, Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Jum'at, 02 Maret 2018**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

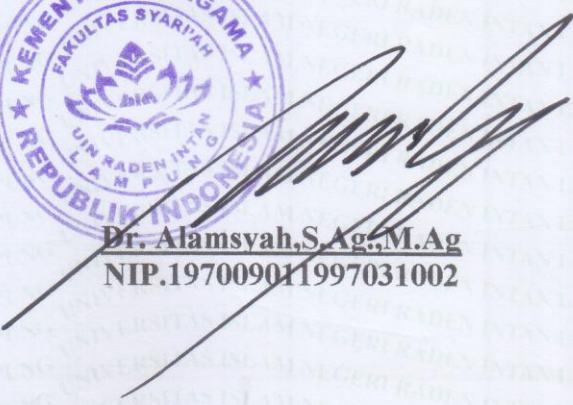
Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

**Mengetahui Dekan,  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**



### MOTTO

مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَاءَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَى مَا ذَا  
يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ( رواه المسلم )

Artinya : Barang siapa menjual buah, lalu bencana alam menimpa buah itu, maka hendaklah ia tidak mengambil sesuatu pun dari saudaranya (pembeli). Berdasarkan apakah seseorang kamu mengambil harta saudara nya itu<sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, diterjemahkan Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 126.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *abbil'amin*, dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cinta dan kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahanda Wadi Widayat dan Ibunda Lusiana yang senantiasa dan tiada henti hentinya mendukung, menyayangi, menemani dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku, membesarkanku dengan do'a dan jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Kakakku Khoirul Anwar dan adikku Indah Karunia Putri dan keluarga besar saya, yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga mengabulkan mimpi, cita-cita kita. Dan kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan bersama.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dan Almater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ria Anisya Fitri dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 19 Agustus 1996, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri pasangan Bapak Wadi Widayat dan Ibu Lusiana. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu kakak laki-laki bernama Khoirul Anwar dan adik perempuan bernama Indah Karunia Putri. Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Tri Dharma Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002.
2. SD Negeri 4 Bumi Waras Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008.
3. MTs Darussalam Tegineneng Lampung selatan pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
4. Kemudian melanjutkann di MAN 2 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.
5. Tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) melalui jalur Seleksi SPAN-PTAIN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah yang SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. H. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
5. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Drs. Henry Iwansyah, M.A., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Mu'amalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung;
10. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudmu;
11. Kakak dan Adikku tercinta Khoirul Anwar dan Indah Karunia Putri, semoga Allah menanamkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita;
12. Sahabat-sahabatku, Saidah, Narulita Sari, Lina Oktasari dan Sifa Fauziah, yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya;
13. Teman-teman Muamalah C angkatan 2014, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini;
14. Keluarga Cemara, Anna, Dewi, Dita, Mia, Rahma, Rexa, Yunita yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk lebih baik lagi;

15. Keluarga Besar IPS Squad yang selalu mendukung, Ica, Imah, septiana, Ira, Farez, Jefta, Heru, Asar, Surya, Hayat;
16. Sahabat seperjuangan masa MTs hingga sekarang, Syahrina Rahmaniah dan Sarah Rahmawati yang telah memberikan semangat dan dukungannya dari jauh;
17. Teman-teman KKN Kelompok 202 Tahun 2017 Pekon Panjerejo Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
18. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2 Maret 2018

Penulis

Ria Anisya Fitri



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam .....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	16
2. Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	29
5. Khiyar dalam Jual Beli .....	36
6. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli .....	38
B. Risiko ( <i>gharar</i> ) dalam Islam .....	39
1. Pengertian Risiko ( <i>gharar</i> ) dalam Islam .....	39
2. Hukum Risiko ( <i>gharar</i> ) .....	41

3. Bentuk-Bentuk Risiko ( <i>gharar</i> ) .....	42
4. Peralihan Risiko: <i>Gharar</i> dalam Transaksi Ekonomi .....	46

### **BAB III : JUAL BELI DAN PERALIHAN RISIKO DALAM KUH**

#### **PERDATA**

A. Jual Beli dalam KUH Perdata .....	56
1. Pengertian Jual Beli .....	56
2. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli .....	57
3. Obyek Jual Beli .....	60
4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli .....	60
B. Risiko dan Peralihan Risiko .....	62
1. Pengertian Risiko .....	62
2. Jenis-Jenis Risiko .....	64
3. Peralihan Risiko dalam KUH Perdata .....	66

### **BAB IV : ANALISIS DATA**

A. Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata .....	75
B. Analisis Pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	78

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Analisis Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam”**. Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb)<sup>2</sup>
2. Pasal 1460-1462 adalah pasal yang menjelaskan tentang peralihan risiko dalam jual beli.
3. KUH Perdata adalah suatu terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. KUH Perdata atau BW sering juga disebut sebagai hukum perdata barat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya dalam menyelenggarakan kepentingannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>3</sup>Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h. iii.

4. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian.<sup>4</sup>
5. Jual beli adalah transaksi atau proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>5</sup>
6. Menurut Ismail Muhammad Syah, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat Islam.<sup>6</sup> Menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>7</sup> Menurut Said Aqil Husin, hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Alaidin Kato, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>9</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam

---

<sup>4</sup> Advendi Simanunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 34.

<sup>5</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 27.

<sup>6</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam, Cet. Ketiga*, ( Jakarta: Bumi Askara, Jakarta, 1999), h. 17.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 42.

<sup>8</sup> Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), h. 6.

<sup>9</sup> Alaidin kato, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 26.



adalah suatu kajian tentang penyelidikan terhadap suatu peristiwa mengenai peralihan risiko dalam jual beli yang diatur atau dijelaskan dalam pasal 1460-1462 KUH Perdata dan hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata pengalihan risiko dalam jual beli dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang.
- b. Menurut pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Dalam Islam, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, oleh karena itu penanggungan risiko masih harus ditanggung oleh penjual sampai pembeli menerimanya.
- c. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam.

## 2. Alasan Subyektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan sangat menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup. Manusia yang tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendiri, tetapi ia harus bekerja sama dengan orang lain. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas, misalnya perdagangan atau jual beli.

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.<sup>10</sup>

Islam melarang praktek jual beli dengan penggunaan timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak. Salah satu keadilan adalah

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenegoro, 2001), h. 36.

menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang dalam firman Allah Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-182.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182).*<sup>11</sup>

Dalam takar menakar dan timbang menimbang ini termasuk juga yang berhubungan dengan ukuran. Dan ingatlah peringatan Tuhan yang amat keras bagi mereka yang merugikan orang lain sehubungan dengan ukuran.<sup>12</sup> Maka apabila kamu menakar dan menimbang, timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang utama bagimu dan baik akibatnya. Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.<sup>13</sup>

Risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian.<sup>14</sup> *Gharar* mengundang ketidakpastian atau ketidaktahuan salah satu atau kedua belah pihak yang terkait kontrak, hal inilah yang banyak mengakibatkan pertikaian dan ketidakadilan. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 299

<sup>12</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Ed.1-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 11.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127.

<sup>14</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162.

akad itu sudah ada maupun belum ada. Namun jika dapat dipastikan ada di kemudian hari maka akadnya tetap sah. Tetapi jika obyek akad tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan keberadaannya di kemudian hari, maka akadnya tidak sah.<sup>15</sup>

Semakin banyak transaksi jual beli dengan menggunakan berbagai macam bentuk jual beli, maka hal tersebut dapat mendatangkan risiko. umpamanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. Dan menjual buah sebelum layak di petik. Hal lain terkait jual beli secara *online*. Biasanya jual beli *online* berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Jual beli *online* yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen yang dapat merugikan pihak konsumen, mengenai barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*, Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan risiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.<sup>16</sup>

Dalam hukum perjanjian, risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>17</sup> Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian

---

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 199.

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet.7 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 98.

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ( Bandung: PT Intermasa, 1982), h. 144.



karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).<sup>18</sup> Persoalan tentang risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Keadaan yang telah timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu di buat.<sup>19</sup>

Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan akibat dari persoalan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat diduga. Misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam ditengah laut akibat badai. Yang menjadi persoalan sekarang siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut? Inilah yang disebut risiko.

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460-1462.<sup>20</sup> Melalui ketiga rumusan pasal tersebut, risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya.

Ketentuan diberlakukannya pasal 1460-1462 ini perlu diketahui dalam pasal 1237 KUH Perdata menjelaskan mengenai peralihan risiko yang isinya adalah dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 410.

<sup>19</sup> Subekti, *Op. Cit*, h. 150.

<sup>20</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h. 366

tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya (si berutang). Tetapi pada dasarnya pasal tersebut belum menjelaskan secara menyeluruh. Maka dari itu selanjutnya ditegaskan dalam pasal 1460-1462 mengenai peralihan risiko dalam jual beli.

Menurut pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Berarti, jika kebendaan tersebut musnah di luar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan.<sup>21</sup>

Ketentuan pasal 1460-1462 KUH Perdata tersebut berbeda dengan apa yang tercantum dalam Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, disana dijelaskan bahwa risiko atas <sup>kerusakan</sup> barang dibedakan menjadi dua yaitu kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan oleh penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:<sup>22</sup>

1. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h.366.

<sup>22</sup> Sabbiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 95

berlangsung seperti sedia kala. Dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.

2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana alam.
4. Jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga.
5. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Barang yang rusak setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika alternatif pilihan dari pihak pembeli, maka pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang dengan yang serupa.

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.<sup>23</sup>

Setelah menerangkan risiko dalam jual beli menurut KUH Perdata, maka fokus kajian skripsi ini adalah membahas tentang peralihan risiko dalam KUH Perdata ditinjau dari aspek hukum Islam. Oleh sebab itu, judul skripsi ini adalah **“ANALISIS PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM”**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata?
2. Bagaimana analisis pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 96.



1. Untuk mengetahui peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui analisis pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai peralihan risiko dalam jual beli.
- b. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami sistem jual beli.
- c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang Mu'amalah.
- b. Berguna untuk kepentingan pribadi, agar bisa menambah pengetahuan penulis tentang Pasal 1460-1462 Perdata tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam.
- c. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung dan menambah ilmu pengetahuan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana analisis menurut hukum Islam tentang peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 6.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan 12, 2012), h. 44.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al-Qur'an, Hadits, Bidayatul Mujtahid, dan Fiqih Sunnah jilid 3.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari buku-buku penunjang seperti ensiklopedia Islam dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi dengan cara mengambil dokumen berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dan peran aktif menulis untuk menganalisa

---

<sup>26</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014), h. 65.

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed.) Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

Pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

## 5. Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>28</sup>
- b. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>29</sup>
- c. Sistematik Data (*sistemslizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup> Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>31</sup>. Selanjutnya setelah data diperoleh, dianalisa secara deskriptif analisis yaitu prosedur penelitian

---

<sup>28</sup> Susiadi AS, *Op. Cit.* h. 122.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

<sup>30</sup> Cholid narbuko, *Op.Cit.* h. 157s

<sup>31</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Kesimpulan akhir menggunakan pendekatan metode induktif yaitu dengan cara menjelsakan dalil-dalil khusus atau teori-teori khusus sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam meneliti masalah ini, metode ini dipakai untuk menganalisa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian ditarik pada suatu kesimpulan dengan menggunakan data-data mengenai hukum Islam.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut *syara'* adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

##### a. Jual beli menurut bahasa (etimologi)

Secara etimologi kata jual berasal dari bahasa Arab, yaitu البيع sebagai masdar dari fi'il madhi باع – يبيع – بيعا yang berarti jual atau menjual.<sup>33</sup> Sedangkan kata beli berasal dari bahasa Arab yaitu, شراء yang diambil dari fi'il madhi شرا – يشري – شري yang berarti beli atau membeli.<sup>34</sup> Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli.

##### b. Jual beli menurut istilah (Terminologi)

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli.

1) Menurut ulama Hanafiyah definisi jual beli yaitu,

مُبَا لَهٗ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجْهٍ مَّخْصُوصٍ

---

<sup>32</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1984), h. 71.

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 75.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 197.

Artinya: jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>35</sup> Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>36</sup>

2) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie definisi jual beli yaitu,

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسٍ مُبَادَلَةٍ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُفِيدَ تَبَادُلُ الْمُلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوْمِ

Artinya: jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka terjadilah penukaran milik secara tetap.<sup>37</sup>

3) Menurut Imam Syafi'i, definisi jual beli pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>38</sup>

4) Menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab qabul*).<sup>39</sup>

5) Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, sebagaimana dikutip oleh Siswadi dalam jurnal *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* (bahasa) artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 114.

<sup>37</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.

<sup>38</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam 2013), h. 1.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>40</sup>

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>41</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukum jual beli adalah boleh. Kebolehannya dapat ditemukan dalam Al-Quran.<sup>42</sup>

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual beli. Pedoman atau dasar hukum jual beli tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

#### **a. Al-Qur'an**

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, (Agustus 2013), h. 60.

<sup>41</sup> Suhrahwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010) , h. 193.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli dibolehkan, dan dibenarkan jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur riba.<sup>44</sup>

Firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.* (QS. An-nisa': 29)<sup>45</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dalam proses jual beli, sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>46</sup>

Firman Allah lainnya yang berkenaan dengan jual beli adalah :

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenegoro, 2001), h. 36.

<sup>44</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), h. 76.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 65.

<sup>46</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), h. 243.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ<sup>ج</sup>

بِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:282)<sup>47</sup>

#### b. Hadits

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi,

antara lain:

Sabda Rasulullah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>48</sup>

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Hakim).

Hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa Rasulullah ditanya,

"Usaha apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang baik".

Jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan. Dan pedagang yang selalu jujur, maka diberkahi usahanya di dunia dan terhormat kedudukannya di hari kemudian, yaitu bersama dengan para nabi dan orang-orang yang benar (jujur).

Hadits lain yang berkenaan dengan jual beli adalah:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 37.

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 192.



Artinya: *Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, siddiqin dan syuhada'.* (HR. Tirmidzi)

## 2. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda Rasul di atas, para ulama fiqih, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, mengatakan bahwa jual beli hukumnya adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih madzhab Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>50</sup>

Dalam hal ini, menurutnya pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.<sup>51</sup>

Di Indonesia Praktik semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM, dan lainnya. Pribadi-pribadi pelakunya dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat.

---

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.117.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), h. 114.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasakh*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>52</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, dalam masalah mu'amalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat seperti jual beli daging babi atau *khamar* untuk keperluan pengobatan. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih*, *fasakh*, dan *batal* adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli *batal* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Contohnya anak kecil penjaja koran, majalah, makanan dan minuman yang biasa kita temui di jalan raya. Jual beli *fasakh* (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (*aqil baligh*), tetapi mempunyai sifat

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. 7 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 91-92.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 92.

terbelakang (tidak mengerti suatu hukum) sehingga menimbulkan pertentangan, contohnya anak kecil yang melakukan transaksi jual beli kambing, motor, sepeda. Sebab, apabila terjadi sengketa, maka akan berakhir di pengadilan. Sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil yang dibawah umur tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>54</sup>

Jual beli menjadi haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual *khamar*, obat terlarang, senjata yang bisa membahayakan ketenteraman umum.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanya *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*), perbuatan, isyarat dan tulisan.<sup>55</sup>

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>56</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>57</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur-unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- 3) Keduanya tidak *mubazir* (boros).
- 4) *Baligh*.<sup>58</sup>
- 5) Beragama Islam.<sup>59</sup>

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.<sup>60</sup>
- 4) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.<sup>61</sup>

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

---

<sup>56</sup> *Ibid*,

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 115.

<sup>58</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 105.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), h. 116.

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.105.

Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan (dikuasai).<sup>62</sup> Penjelasan masing-masing syarat di atas adalah sebagai berikut:

1) Bersih barangnya.

Barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang jenis atau yang diharamkan. Barang yang mengandung najis, arak dan bangkai boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan. Misalnya kotoran atau tinja dan sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.<sup>63</sup>

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.<sup>64</sup> Bangkai, *khamar* dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut dalam pandangan Islam tidak bermanfaat bagi manusia.<sup>65</sup>

3) Milik orang yang melakukan akad.

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan ikan di laut.<sup>66</sup>

4) Mampu menyerahkan.

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, alih bahasa oleh kamaludin A. Marzuki, terjemah fiqih sunnah, (Bandung: Bandung: Alma'arif, 1988), h. 52.

<sup>63</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h.107.

<sup>64</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 111.

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 124.



Jual beli barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, karena penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.<sup>67</sup>

5) Mengetahui.

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, beratnya, atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>68</sup>

6) Barang yang diakadkan ada di tangan.

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakkan di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada. Karena Menjual barang sebelum ada di tangan, tidak boleh. Karena dikhawatirkan barang itu rusak pada waktu masih di tangan penjual, sehingga jual beli tersebut menjadi *gharar*.<sup>69</sup>

d. Syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang pada masa sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar tersebut terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Syarat harga barang adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 73.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), h. 118.

<sup>70</sup> *Ibid.*

- 2) Boleh diserahkan pada waktu transaksi, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang tersebut dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan *khamar*. Karena kedua benda itu dalam pandangan syara' tidak mempunyai nilai.

Disamping syarat yang terkait dengan rukun jual beli, ada juga syarat yang berkaitan dengan sahnya jual beli, yaitu:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat. Misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan jual beli yang mengandung unsur paksaan dan penipuan.
- 2) Jika barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan seperti jual beli rumah atau tanah.<sup>71</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Sistem mu'amalah dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta. Tetapi ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

ditekankan dalam setiap bentuk jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu;<sup>72</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli pesanan (*salam*).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, Mazhab Hanafi membagi jual beli menjadi tiga bentuk yaitu :<sup>73</sup>

a. Jual Beli *Sahih*

Jual beli dikatakan *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi. Umpamanya seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima.<sup>74</sup> Namun jual beli yang *sahih* dapat juga dilarang dalam syariat apabila:

- 1) Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.
- 2) Menyempitkan gerakan pasar.

---

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75-76.

<sup>73</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 128

<sup>74</sup> *Ibid*,

3) Merusak ketenteraman umum.<sup>75</sup>

b. Jual beli yang *Batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *batil*. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang dijual dilarang *syara'*. Bentuk jual beli yang *batil* antara lain:<sup>76</sup>

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*batil*. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang masih berada di dalam perut ibunya.<sup>77</sup> Tetapi jual beli barang yang tidak ada pada waktu akad dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah.<sup>78</sup>

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Unsur tipuan dalam jual beli bisa terjadi pada kuantitas, kualitas dan harga barang yang diperjualbelikan. Unsur tipuan pada kuantitas barang terjadi ketika penjual mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya.

---

<sup>75</sup> Gemala Dewi, *Op. Cit.*, h. 105.

<sup>76</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 122.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 129.

Secara kualitas unsur tipuan terjadi manakala penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Begitupun dengan harga, penjual menaikkan harga barang yang tidak diketahui pembeli melebihi harga pasar.

4) Jual beli benda najis.

Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan. Seperti babi, *khamar*, bangkai, dan darah.

5) Jual beli al-*urbun*.

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

6) Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif)

Misalnya memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut. Menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.

c. Jual beli *fasakh*

Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen membedakan jual beli *fasakh* dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sedang *fasakh* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Akad yang *fasakh* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka



hukumnya batal. Misalnya jual beli benda-benda haram (*khamar*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasakh*.<sup>79</sup> Yang termasuk jual beli *fasakh* adalah:

1) Jual beli *majhul*.

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui atau ketidakjelasan bersifat menyeluruh. Tetapi jika ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya sah. Karena tidak akan membawa perselisihan. Tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli. Umpamanya seorang pembeli ingin membeli baju dan ia meminta kepada penjual diambilkan tiga potong, dengan syarat mana yang disukainya. Sejak semula barang yang dipilih belum jelas mana yang akan dibeli, karena yang dibeli hanya satu baju dari tiga contoh yang diminta.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat.

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.” Menurut jumhur ulama, jual beli ini batal. Menurut ulama Hanafi, Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi, yaitu apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

3) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah memperbolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan,

---

<sup>79</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), h. 125.

dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar* kemampuan meraba atau mengindera.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.

Misalnya babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian.

6) Jual beli al-*ajal*.

Yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya seorang menjual barangnya dengan harga 150.000, dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah barang diserahkan, pemilik pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya 120.000, sehingga pembeli pertama berhutang 30.000. jual beli ini termasuk jual beli *fasid* karena mengarah kepada riba.<sup>80</sup>

7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamar*.

Jika telah terjadi akad, maka akadnya batal, karena tujuan akad adalah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi disini kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat, justru mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang oleh *syara'*.<sup>81</sup>

8) Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan.

Misalnya jika pembeli membeli dengan kontan harganya 750.000, tetapi jika berhutang harganya menjadi 800.000. Menurut ulama madzhab Syafi'i

---

<sup>80</sup> *Ibid.* h. 127.

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 77.

dan Hambali, jual beli bersyarat tersebut adalah batal, tetapi madzhab Maliki menyatakan sah apabila pembeli diberi hak *khiyar* (pilihan).<sup>82</sup>

9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing dari kambing yang masih hidup dan menjual sepatu hanya sebelah.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Menurut ulama fiqih, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasakh* menurut ulama Hanafiyah, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui.<sup>83</sup>

##### **5. *Khiyar* dalam Jual Beli**

Dalam Islam ada hak istimewa dalam jual beli yaitu hak yang diberikan islam kepada pihak-pihak yang melakukan jual-beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, hak tersebut dinamakan *Khiyar*.<sup>84</sup>

*Khiyar* ialah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya.<sup>85</sup> Menurut terminologis para Ulama Fiqih mendefinisikan *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau

---

<sup>82</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 137.

<sup>83</sup> *Ibid.* h. 138

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 213.

<sup>85</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 118.

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>86</sup>

Hak *khiyar* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Diadakan *Khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi tipu-menipu. Status *khiyar* menurut ulama Fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan kepada masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

*Khiyar* itu ada tiga bentuk:

- a. *Khiyar majlis*, yaitu hak pilih dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar majlis* tidak berlaku (batal).
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu hak pilih yang disepakati dan ditetapkan waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian apabila sudah lewat dari waktu yang ditentukan, berarti *khiyar syarat* tidak berlaku lagi.
- c. *Khiyar 'aib*, yaitu hak pilih yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju

---

<sup>86</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.78.

tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka *khiyar 'aib* tidak berlaku.<sup>87</sup>

## 6. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat terjadinya akad, maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fikih dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- a. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian).
- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
- c. barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- d. barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini, risikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung risiko ganti rugi.

---

<sup>87</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit*, h. 118.

Demikian pula apabila barang itu rusak atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ada ganti rugi. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut adakalanya berbentuk barang ataupun uang, sesuai kesepakatan bersama. Jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Apalagi sekiranya perselisihan itu sampai ke pengadilan.<sup>88</sup>

## **B. Risiko (*Gharar*) dalam Islam**

### **1. Pengertian Risiko (*Gharar*)**

Arti dalam bahasa Arab الغرر *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>89</sup>

Wahbah Az-Zuhaili (Guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus Suriah), sebagaimana dikutip oleh Am Ali Hasan, memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* (risiko, berbahaya) dan *at-taghrir* (akibat, bencana, bahaya, risiko, ketidakpastian dan lain-lain), yang artinya sesuatu yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Contohnya seperti perjudian yang pada dasarnya membuat orang yang gemar bermain judi senang melakukannya bahkan telah menjadi kebiasaan, sehingga tanpa mereka sadari bahwa apa yang telah mereka lakukan itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127-128

<sup>89</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, (Januari, 2009), h. 54.

<sup>90</sup> Am Hasan Ali, *Asuransi Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 134.



Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.<sup>91</sup>

Secara istilah fiqih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.<sup>92</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Nadratuzzaman, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.<sup>93</sup>

Imam al-Qardafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

---

<sup>91</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Op. Cit*, h. 54.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.<sup>94</sup>

*Gharar* yang menimbulkan keraguan, kecurangan dan kebohongan:

- a. Menjual ikan di dalam air.
- b. Menjual burung di udara.
- c. Menjual hewan yang masih dalam kandungan berupa janin.
- d. Menjual tangkapan yang masih dalam perangkap.
- e. Menjual susu yang belum tentu hewan tersebut menghasilkan.<sup>95</sup>

## 2. Hukum *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Rachmat syafe'i, di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *batil*.<sup>96</sup> Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT, yaitu:

---

<sup>94</sup> *Ibid.* h. 56

<sup>95</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. 7 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 98.

<sup>96</sup> *Ibid.*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).<sup>97</sup>

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur tipuan, baik karena ketidakjelasan dalam obyek jual beli ataupun ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum Jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)<sup>98</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya) (HR Muslim).

### 3. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>99</sup>

a. Jual beli barang yang belum ada (*ba'i ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenegoro, 2001), h. 23

<sup>98</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 197.

<sup>99</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, (Januari, 2009), h. 56.

ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air.<sup>100</sup>

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.<sup>101</sup>

2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.

Misalnya larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu.<sup>102</sup>

3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.* h. 57.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Jelas bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.<sup>103</sup>

4) Tidak adanya kepastian obyek akad.

Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah* (dua jual beli atau transaksi dengan satu akad). Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.<sup>104</sup>

5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi atau jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.<sup>105</sup>

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.

1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.<sup>106</sup>

2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *illat* (alasan) dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.<sup>107</sup>

3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13.000.000, jika kontan atau tunai. Dan Rp. 20.000.000, jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit. Namun ketika akad

---

<sup>105</sup> *Ibid.* h. 58.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*



berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.<sup>108</sup>

- 4) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk: (a). Jual beli lempar batu (*bai al-hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk membelinya. (b). Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang membelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib membelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan membelinya.<sup>109</sup>

#### **4. Peralihan Risiko: *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi**

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.* h. 59

<sup>110</sup> *Ibid.*

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar.<sup>111</sup>

Tentang pelarangan *gharar*, Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar*. *Gharar* bermakna kekhawatiran atau risiko. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Havis Arafik, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui sehingga jual beli dalam hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, *gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi.<sup>112</sup>

Mengenai peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam, agar lebih mudah memahami berikut penjelasannya melalui tabel di bawah ini.

Proses Jual Beli	Peralihan Risiko	
	Sebelum penyerahan barang	Sesudah penyerahan barang
Jual Beli Tangguh ( <i>ba'i Ma'dum</i> )	Penjual	Pembeli

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Havis Arafik, "Asuransi dalam Perspektif Islam", Jurnal *NURANI*, VOL. 16, NO. 2, (Desember 2016), h. 41.

<b>Jual Beli Online</b>	Penjual	Pembeli
<b>Jual Beli Salam (Pesanan)</b>	Penjual	Pembeli
<b>Jual Beli <i>Majhul</i> (Jual beli yang belum diketahui Kejelasan barangnya)</b>	Penjual	Pembeli

Dari skema peralihan risiko yang telah dijelaskan pada tabel di atas, maka penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut.

a. Jual beli tangguh (*Ba'i Ma'dum*)

Bentuk bisnis atau jual beli modern ada yang disebut *Future Trading* atau *bai al-ma'dum* yaitu jual beli dengan pembayaran harga yang disepakati secara tunai, sedang penyerahan barangnya ditangguhkan pada waktu yang dijanjikan oleh penjual dan disetujui pembeli (jatuh tempo). Bisnis seperti ini asalnya halal, menjadi haram jika mengandung unsur *gharar*, dan tidak pasti dalam obyek.<sup>113</sup> Misalnya ketika memesan barang secara pesanan, harga telah disepakati di awal transaksi kemudian konsumen mentransfer biayanya atau memberikan pelunasan terhadap barang yang akan dipesan, tetapi pada waktu yang telah ditentukan barang yang menjadi pesanan tidak sampai pada waktu yang disepakati di awal. Keberadaannya tidak diketahui dimana, maka inilah yang dimaksud jual beli yang mengandung unsur *gharar*, dan disebut dengan *gharar* pada obyek transaksi.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Iman Santoso, "Gharar Dalam Fiqih Muamalah (Realita Dan Solusi)" (On-line), tersedia di : <http://www.syariahonline.com/v2./3191-gharar-dalam-fiqih-muamalah-realita-dan-solusi.html> (28 Oktober 2017)

<sup>114</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 201.

Contohnya Ibu Ira memesan 2 botol susu sapi murni kepada peternak sapi dengan melakukan pembayaran secara cash, tetapi susu sapi murni tersebut akan diberikan 2 minggu kemudian, karna susu sapi baru bisa diperah sekitar 2 minggu lagi menurut peternak sapi. Tetapi pada saat waktu yang telah ditentukan ternyata sapi tidak mengeluarkan susunya. Peristiwa seperti ini termasuk dalam jual beli *gharar*, karna adanya unsur ketidakpastian dalam obyek akad.

Menurut hukum Islam jual beli semacam ini menjadi *fasakh* (rusak), karna jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana alam. Jika jual beli *fasakh* (rusak), maka peralihan risikonya tidak ditanggung oleh penjual maupun pembeli, karna risiko yang terjadi bukan akibat/ulah dari penjual maupun pembeli melainkan akibat dari perbuatan barang itu sendiri (sapi). Jika barang (susu murni) tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi setelah serah terima dari penjual kepada pembeli, maka risikonya ditanggung oleh pembeli yang sudah menjadi penguasa dari barang tersebut.<sup>115</sup>

b. Jual beli *Online*

Saat ini jual beli secara *online* banyak digemari para konsumen dalam melakukan transaksi. Konsumen tidak perlu repot harus datang secara langsung ke tempatnya yang kemungkinan sangat jauh dari kediaman kita. Misalnya Rani tinggal di Lampung dan ingin membeli baju merek A, tetapi baju tersebut hanya ada di Bandung. Sehingga tidak memungkinkan Rani untuk pergi ke Bandung. Maka Rani melakukan pemesanan atau transaksi secara *online*, dengan menyebutkan jenis dan spesifikasi barang yang ia inginkan. Dan pembayaran

---

<sup>115</sup> Sayid Sabiq, *Op. Cit*, h. 95-96

harga yang disepakati secara tunai pada awal melakukan transaksi, dengan pembayaran melalui transfer. Sedangkan penyerahan barangnya ditangguhkan pada waktu yang dijanjikan oleh penjual.

Namun kekurangan dari *online shop* ini sendiri adalah bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan deskripsi atas barang yang terdapat dalam gambar di media sosial tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara *online* tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*. Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan risiko penggunaan barang (jika yang di beli adalah produk kecantikan) menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Jika berbicara mengenai kualitas terhadap barang yang dipesan secara *online*, kualitas yang dimaksud adalah manakala penjual menyembunyikan cacat barang yang diperjual belikan. Begitupun dengan harga, penjual menaikkan harga barang yang tidak diketahui pembeli melebihi harga pasar. Hal seperti ini juga disebut dengan jual beli *gharar* pada pada sifat dan karakter obyek akad, karna tidak ada kejelasan mengenai sifat dan karakter obyek akad.

Menurut hukum Islam Peralihan risiko dalam jual beli secara *online* sebelum barang diserahkan kepada pembeli maka risiko masih ditanggung penjual. Tetapi jika barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli setelah penyerahan barang dilakukan, karna pembeli adalah penguasa barang tersebut.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

c. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Contohnya, Seorang ibu ingin memesan apel 20 kg yang manis dan berkualitas tinggi dengan harga Rp. 15.000/kg, dimana pembeli membayar uang atau diserahkan terlebih dulu, sedangkan apelnya akan diserahkan pada tanggal yang telah disetujui kedua belah pihak.<sup>117</sup>

Ketika pada saat waktu yang telah ditentukan, tetapi barang pesanan tidak ada atau tidak dapat dihadirkan keberadaannya karna kelalaian dari penjual seperti meletakkan barang tersebut ditempat yang kurang aman, sehingga barang pesanan tersebut habis dimakan tikus. Maka jual beli tersebut menjadi *gharar* pada obyek transaksinya.

Mengenai peralihan risiko yang terjadi dalam jual beli semacam ini, maka risiko ditanggung oleh penjual sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli, karna jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga. Dan risiko menjadi tanggungan pembeli setelah barang tersebut diserahkan dari penjual kepada pembeli.<sup>118</sup>

d. Jual beli *majhul* (jual beli yang belum diketahui kejelasan barangnya)

Jual beli benda atau barang yang secara global tidak diketahui atau ketidakjelasan bersfat menyeluruh. Umpamanya seorang pembeli ingin membeli baju dan ia meminta kepada penjual diambilkan tiga potong, dengan

---

<sup>117</sup> Iman Santoso, *Op. Cit.* (28 Oktober 2017).

<sup>118</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 96



syarat mana yang disukainya. Sejak semula barang yang dipilih belum jelas mana yang akan dibeli, karena yang dibeli hanya satu baju dari tiga contoh yang diminta.

Mengenai peralihan risiko yang terjadi dalam jual beli semacam ini, maka risiko ditanggung oleh penjual sebelum barang yang diperjual belikan diserahkan kepada pembeli, karena jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga. Dan risiko menjadi tanggungan pembeli setelah barang tersebut diserahkan dari penjual kepada pembeli.

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan (*gharar*) tidak sah. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya kelihatan tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.<sup>119</sup>

Dari beberapa contoh di atas yang secara keseluruhan berbicara mengenai jual beli salam (pesanan), dimana konsumen telah membayar biaya transaksi di awal tetapi barangnya belum diterima atau masih dalam proses pengiriman. Karena jual beli salam adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal, tetapi penyerahan barangnya ditangguhkan (jatuh tempo).

---

<sup>119</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 129.

Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa peralihan risiko belum berpindah dari penjual kepada pembeli, karna penyerahan barang belum dilakukan.

Namun jika pada proses pengiriman barang pesanan terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena mobil pengangkut barang tersebut mengalami kecelakaan dan barang yang menjadi pesanan konsumen rusak dan hancur akibat dari kecelakaan tersebut. Maka siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut? Inilah yang disebut risiko dalam jual beli.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, sebagaimana dikutip dalam buku Ibnu Rusyd, bahwa pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.<sup>120</sup> Fuqaha berpendapat, sebagaimana dikutip dalam buku Ibnu Rusyd, bahwa penerimaan termasuk dalam syarat sahnya akad, maka tanggungan adalah dari penjual dan menurut Imam Malik, sampai pembeli menerimanya.<sup>121</sup>

Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat bahwasanya nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

Jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Barang yang rusak

---

<sup>120</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, diterjemahkan Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 124.

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 125.

setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika alternatif pilihan dari pihak pembeli, maka pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.<sup>122</sup>



---

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, alih bahasa oleh kamaludin A. Marzuki, terjemah fiqih sunnah, (Bandung: Bandung: Alma'arif, 1988), h. 95.

### BAB III

## JUAL BELI DAN PERALIHAN RISIKO DALAM KUH PERDATA

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Prancis disebut hanya dengan *vente* yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan *kauf* yang berarti pembelian.<sup>123</sup>

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>124</sup>

Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>125</sup>

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut

---

<sup>123</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

<sup>124</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014), h. 366.

<sup>125</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Unsur esensial (utama) perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas benda yang dijualbelikan dan menjamin cacat tersembunyi serta kenikmatan tenteram atas benda yang dijualbelikan. Karna unsur esensial adalah unsur yang sifatnya harus ada di dalam perjanjian. Jadi, sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.<sup>126</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

## **2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli**

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak.**

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>127</sup>

Dengan demikian, cara ini dikatakan sistem terbuka, artinya dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan

---

<sup>126</sup>*Ibid.* h. 321.

<sup>127</sup>Subekti, Tjitrosudibio, *Op. Cit*, h. 342.

pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.<sup>128</sup>

b. Asas Konsensualitas (Kesepakatan)

Asas Konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok.<sup>129</sup> Asas Konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>130</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yaitu, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu kesepakatan lisan saja, yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.<sup>131</sup>

c. Asas Obligator

---

<sup>128</sup> Advendi Simanunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 30.

<sup>129</sup> *Ibid.* h. 31

<sup>130</sup> Subekti, Tjitrosudibio. *Op. Cit.* h. 339

<sup>131</sup> Advendi Simanunsong, Elsi Kartika Sari, *Op. Cit.* h. 31



Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan (*levering*).

Sifat jual beli ini tampak jelas dari Pasal 1459 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Hal ini berlainan dengan sistem *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.

### 3. Obyek Jual Beli

Obyek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya.<sup>132</sup> Benda yang menjadi obyek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian benda yang dijualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka (umum) dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.<sup>133</sup>

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi obyek jual beli. Menurut pasal 499

---

<sup>132</sup>Subekti, Tjitrosudibio. *Op. Cit.* h. 157

<sup>133</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 318

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *zaak* adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>134</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Jual Beli

##### a. Hak penjual dan pembeli

Hak penjual adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian.<sup>135</sup>

Hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa.

---

<sup>134</sup>Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014), h. 157.

<sup>135</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 6.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>136</sup>

b. Kewajiban penjual dan pembeli

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1474, Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Sedangkan penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, serta adanya cacat pada barang yang tidak diketahui sehingga menimbulkan alasan pembatalan pembelian.<sup>137</sup>

Kewajiban pembeli ialah menerima dan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian jual beli pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.<sup>138</sup>

## **B. Risiko**

### **1. Pengertian Risiko**

---

<sup>136</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.

<sup>137</sup>Subekti, Tjitrosudibio, Op. Cit. h. 369

<sup>138</sup>Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, alih bahasa oleh Abdulkadir Muhammad. (Bandung : PT. Alumni, 2006), h. 244

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko. Sekalipun orang berusaha untuk menghindari risiko, setiap orang pasti akan menghadapi risiko.<sup>139</sup>

Dalam kehidupan tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya, kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya.<sup>140</sup>

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Jarak waktu antara dimulai perencanaan kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.

Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.

- b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- c. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, teknik mengambil keputusan.

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

---

<sup>139</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen bisnis*, cet.3, (Jakarta:PT.Rineka cipta,2004), h.326.

<sup>140</sup> Havis Arafik, Asuransi dalam Perspektif Islam, *Jurnal Nurani*, VOL. 16, NO. 2,(Desember 2016), h. 32.

- a. Menurut Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).<sup>141</sup>
- b. Sedangkan risiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>142</sup>
- c. Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).<sup>143</sup>
- d. Menurut Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>144</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan atau potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>145</sup>

Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.<sup>146</sup>

## 2. Jenis-Jenis Risiko

Ada empat jenis risiko yang dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yaitu risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja, misalnya seseorang yang menginginkan umur panjang, akan terbuka kemungkinan mati lebih

---

<sup>141</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

<sup>142</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7.

<sup>143</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 410.

<sup>144</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), h. 59

<sup>145</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 30.

<sup>146</sup>Subekti, *Op.Cit.* h. 59.

<sup>147</sup>Pandji Anoraga, *Manajemen bisnis*, cet.3, (Jakarta:PT.Rineka cipta,2004), h. 329.

cepat atau mati muda. Seorang pemilik rumah terbuka mempunyai kerugian. Risiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian. Risiko ini hanyalah mempunyai kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan untung.

b. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yaitu risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan. Kejadian yang terjadi sesungguhnya kadang-kadang menyimpang dari perkiraan ke salah satu dari dua arah. Artinya ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka dikatakan risiko itu bersifat spekulatif. Misalnya seseorang yang membeli saham mengharapkan kenaikan harga sahamnya itu sehingga memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan melakukan transaksi tersebut terbuka dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Risiko adalah kemungkinan kerugian, tetapi bila di samping kemungkinan kerugian terdapat kemungkinan untung maka risiko itu dinamakan risiko spekulatif.

c. Risiko fundamental, adalah risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir sebagian besar anggota masyarakat. Jadi akan bersifat menimpa sebagian anggota masyarakat dan ada perseorangan. Misalnya risiko terhadap bahaya perang, gempa bumi dan lain sebagainya.

d. Risiko tertentu, merupakan risiko yang mengenai perorangan atau secara pribadi, artinya bahwa risiko tersebut benar-benar merupakan kemungkinan yang hanya menimpa orang-orang pribadi, jadi ada kemungkinan yang dapat menjadi kenyataan menimpa pribadi seseorang, seperti kematian atau cacat.

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian atau



disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya, kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya.<sup>148</sup> Sedangkan *hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.<sup>149</sup>

### 3. Peralihan Risiko dalam KUHPerdato

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460-1462 yang bunyinya sebagai berikut:<sup>150</sup>

Pasal 1460

“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.

Pasal 1461

“Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur”.

Pasal 1462

“Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Mengenai pearalihan risiko dalam jual beli menurut KUH Perdata pasal 1460-1462, agar lebih mudah memahami berikut penjelasannya melalui tabel di bawah ini

Proses Jual Beli	Peralihan Risiko	
	Sebelum penyerahan barang	Sesudah penyerahan barang
Jual beli barang tertentu (Seperti jual beli lemari Jati)	Pembeli	-
Jual beli barang timbangan (Seperti jual beli buah dan telur di pasar)	Pembeli	-

<sup>148</sup>*Ibid*, h. 328.

<sup>149</sup>Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 7.

<sup>150</sup>Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit*, h. 366.

<b>Jual beli barangtumpukan (Seperti Jual beli baju grosiran atau pasir)</b>	<b>Pembeli</b>	<b>-</b>
--	----------------	----------

Dari skema peralihan risiko yang telah dijelaskan pada tabel di atas, maka penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut.

Dalam jual beli, risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu.

Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.

a. **Jual Beli Barang Tertentu (dalam pasal 1460 KUH Perdata)**

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata pada bab sebelumnya.

Risiko dalam jual beli, pada umumnya menurut pasal 1460 KUH Perdata, diletakkan pada pundaknya si pembeli. Pasal tersebut dibatasi berlakunya, hingga hanya mengenai barang tertentu saja yang musnah sebelum diserahkan kepada si pembeli.<sup>151</sup> Barang tertentu adalah suatu barang yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya. Jadi, persetujuannya sudah bersifat final, bearti sudah sah dan mengikat.

---

<sup>151</sup>Subekti, *Op. Cit*, h. 83.

Dalam perdagangan benda yang dimaksud memang merupakan benda siap jual. Misalnya orang datang ke sebuah toko perabot rumah dan menyatakan keinginannya untuk membeli meja tulis atau lemari pakaian seperti yang ditunjuknya. Jadi bukan ia memesan meja seperti yang ditunjuknya.<sup>152</sup>

b. Jual Beli Barang Timbangan (dalam pasal 1461 KUH Perdata)

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengantimbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung.<sup>153</sup> Misalnya Seseorang yang membeli buah di supermarket atau membeli telur di pasar.

c. Jual Beli Barang Tumpukan (dalam pasal 1462 KUH Perdata)

Jika barang dijual menurut tumpukan atau onggokan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung.<sup>154</sup> Misalnya seseorang yang melakukan jual beli kardus bekas atau seseorang yang membeli kue bolu (loyang). Atau bisa juga seseorang yang melakukan jual beli baju grosiran/baju pada konveksi.

Dalam pasal ini, jual beli benda menurut tumpukan menjadi risiko pembeli meskipun benda tersebut belum diukur, ditimbang dan dihitung. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa benda tersebut sudah dipisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah dikuasai pembeli. Dalam hal ini wajarlah jika risiko atas benda yang sudah dipisahkan itu menjadi beban pembeli.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 334.

<sup>153</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 83.

<sup>154</sup>*Ibid.*

<sup>155</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 336.

Melalui rumusan Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai kebendaan yang dijual baru beralih dari penjual kepada pembeli, segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitungkan atau diukur; dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, risiko jual beli atas barang-barang generik (bergerak), tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan atau ongkongan, barang menjadi risiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.

Mengenai risiko yang terjadi menurut pasal 1460-1462, maka dapat dijelaskan melalui contoh yang banyak terjadi di era modern ini misalnya, kita mengambil contoh dari pasal 1460 tentang jual beli berdasarkan barang yang telah ditentukan seperti jual beli benda elektronik di toko A. Roni ingin membeli sebuah kulkas di sebuah toko A, setelah berdiskusi dengan penjual, maka terjadilah kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan jenis barang yang diinginkan Roni. Kemudian Roni membayar lunas kulkas tersebut kepada penjual. Dan Roni meminta agar kulkas yang ia beli untuk diantarkan ke rumahnya.

Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa peralihan risiko telah berpindah dari penjual kepada pembeli setelah terjadi kesepakatan mengenai barang yang telah ditentukan. Barang yang telah ditentukan adalah berupa kulkas.

Karna Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Seperti ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun penyerahannya belum dilakukan”.<sup>156</sup>

Namun jika pada proses pengiriman barang pesanan terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena mobil pengangkut barang tersebut mengalami kecelakaan dan barang yang menjadi pesanan konsumen rusak dan hancur akibat dari kecelakaan tersebut. Maka siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut? Inilah yang disebut risiko dalam jual beli.

Menurut pasal 1460-1462, risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya.<sup>157</sup>

Menurut subekti dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian*, bahwa ia tidak setuju dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1460-1462 KUH Perdata mengenai peralihan risiko jual beli yang membebaskan risiko kepada pembeli jika barang yang dijual tersebut berupa barang yang sudah ditentukan berat, jumlah, ukuran atau tumpukannya. Subekti berpendapat bahwa selama belum *dilever* mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus ditanggung atau dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang tersebut diserahkan kepada pembeli.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 80.

<sup>157</sup>Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit*, h. 366.

<sup>158</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 28.

Menurut Subekti, yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, penerapan pasal 1460 KUH Perdata ini oleh masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi dengan menunjuk Yuriprudensi Mahkamah Agung Belanda yang menafsirkan pasal 1460 secara sempit, yaitu menunjuk pada perkataan “benda tertentu” yang harus diartikan sebagai benda yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan benda lain.

Dengan membatasi berlakunya pasal 1460 seperti itu, pembeli yang sudah menunjuk sendiri benda yang dibelinya dapat dianggap seolah-olah menitipkan bendanya sampai benda itu diantarkan ke rumah pembeli. Demikian juga ketentuan risiko dalam pasal 1461 dan 1462 KUH Perdata.

Menurut Marsh and soulsby, seorang pakar hukum dari UK menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Business Law* bahwa ketentuan dasar untuk menentukan pada siapa kerugian itu seharusnya dibebankan merujuk pada pasal 1460 KUH Perdata (risiko pada jual beli) dan pasal 1545 KUH Perdata (risiko pada tukar menukar).

Dalam pasal 1460 sudah jelas bahwa risiko di tanggung oleh pihak pembeli setelah barang itu ditentukan atau setelah adanya kata sepakat mengenai barang yang ingin dibeli. Tetapi sebaliknya dalam pasal 1545 yang berbunyi: jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar kesalahan pemiliknya (penjual), maka perjanjian dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan dalam tukar menukar itu.

Memang kedua pasal tersebut diatas berlainan sekali. Pasal 1460 meletakkan risiko pada pundaknya pembeli yang merupakan kreditur barang yang



dibelinya. Pasal 1545 meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang. Pengaturan yang diletakkan pada pasal 1545 memang sudah tepat dan adil karna sudah selayaknya bahwa risiko mengenai suatu barang itu dipikulkan kepada pemiliknya.<sup>159</sup>

Menilik riwayatnya, jelaslah sudah bahwa pasal 1460-1462 KUH Perdata tersebut oleh pembuat undang-undang dikutip dari *code civil* (kitab undang-undang hukum perdata di Perancis). Dalam *code civil* apa yang dicantumkan pada pasal 1460-1462 itu memang tepat, karena disitu berlaku peraturan bahwa dalam hal perjanjian jual beli, hak milik atas barang berpindah seketika pada saat ditutupnya perjanjian, dan sejak ditutupnya perjanjian barang tersebut sudah menjadi milik pembeli walaupun belum dilakukan serah terima. Jadi tidak seperti dalam sistem B.W (*burgelijk wetboek*) dimana masih harus dilakukan penyerahan untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1459 KUH Perdata bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.<sup>160</sup>

Apabila benda yang dijual bukan benda yang sudah ditentukan baik ukuran, timbangan maupun jumlahnya dan tanggungan risiko berada dipihak pembeli, maka itu merupakan suatu ketidakadilan yang diterima pembeli, karna pada hakikatnya benda yang menjadi obyek jual beli belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Maka jelaskan bahwa sistem *code civil* di Perancis, dalam hal ini menerapkan peralihan risiko jual beli apa yang telah tercantum dalam pasal 1460-1462 KUH Perdata. Sebaliknya sistem B.W (*burgelijk wetboek*) mengenai

---

<sup>159</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), h. 60

<sup>160</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 334

peralihan risiko jual beli masih ada beberapa para ahli yang mempunyai pendapat masing-masing yang bertentangan dengan pasal 1460-1462 KUH Perdata, sehingga permasalahan mengenai risiko jual beli ini masih harus dikaji.

Para ahli hukum secara keseluruhan memiliki pendapat yang serupa, bahwa pada intinya selama belum *delivered* mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus ditanggung atau dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang tersebut diserahkan kepada pembeli.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul Analisis Pasal 1460-1462 tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli menurut Hukum Islam, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil analisa penulis yaitu sebagai berikut:

#### **A. Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.**

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan dengan masalah risiko di dalam perjanjian jual beli. Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa, adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa yang tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.

Dalam jual beli, risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu. Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.

Pasal 1460 KUH Perdata.

“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya”.

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Barang tertentu adalah suatu barang yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya.

Pasal 1461 KUH Perdata.

“Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang-barang ditimbang, dihitung dan diukur”.

Jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung.

Pasal 1462 KUH Perdata.

“Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung.

Melalui rumusan Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai kebendaan yang dijual baru beralih dari penjual kepada pembeli, segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung atau diukur, dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, risiko jual beli atas barang-barang tertentu, tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang barang

itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat, jika barang tertentu tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang menjadi risiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa peralihan risiko dalam jual beli menurut KUH Perdata pasal 1460-1462 KUH adalah semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli, setelah barang tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung, dan ditentukan tumpukannya, walaupun penyerahan atas barang tersebut belum dilakukan.

#### **B. Analisis Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Peralihan risiko jual beli diatur dalam beberapa pasal, di antaranya adalah Pasal 1460-1462 (risiko dalam jual beli). Ketiganya mengatur masalah risiko dalam suatu perjanjian timbal balik.

Peralihan risiko dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi. Pasal 1461 KUH Perdata menjelaskan tentang peralihan risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran. Setelah barang yang diperjualbelikan ditimbang, dihitung dan diukur, maka sejak saat itu risiko beralih kepada pembeli, sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, menurut Pasal 1462 KUH Perdata yaitu sejak semula risiko dibebankan kepada pembeli.

Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.

1. Jual Beli Barang Tertentu (dalam pasal 1460 KUH Perdata)

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah.

Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, dalam suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sejak saat ditutupnya perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan dan masih berada ditangan penjual. Dengan demikian, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual, penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.

Risiko dalam jual beli, pada umumnya menurut pasal 1460 KUH Perdata, diletakkan pada pundaknya si pembeli. Pasal tersebut dibatasi berlakunya, hingga hanya mengenai barang tertentu saja yang musnah sebelum diserahkan kepada si pembeli. Barang tertentu adalah suatu barang yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya. Misalnya orang datang ke sebuah toko perabot rumah dan menyatakan keinginannya untuk membeli meja tulis atau lemari pakaian seperti yang ditunjuknya.

Contohnya jual beli lemari jati di toko A. Roni ingin membeli sebuah lemari jati di sebuah toko meubel, setelah berdiskusi dengan penjual, maka terjadilah kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan jenis barang yang diinginkan Roni. Kemudian Roni membayar lunas lemari jati



tersebut kepada penjual. Dan Roni meminta agar lemari jati yang ia beli untuk diantarkan ke rumahnya.

Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa peralihan risiko telah berpindah dari penjual kepada pembeli setelah terjadi kesepakatan mengenai barang yang telah ditentukan. Barang yang telah ditentukan adalah berupa lemari jati. Karna Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Namun jika pada proses pengiriman barang pesanan terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena mobil pengangkut barang tersebut mengalami kecelakaan dan barang yang menjadi pesanan konsumen rusak dan hancur akibat dari kecelakaan tersebut. Maka siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut? Inilah yang disebut risiko dalam jual beli.

Namun ketika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sehingga pada waktu yang telah ditentukan barang yang menjadi pesanan tidak sampai pada waktu yang disepakati di awal dan keberadaannya tidak diketahui dimana, maka inilah yang dimaksud jual beli yang mengandung unsur *gharar*, dan disebut dengan *gharar* pada obyek transaksi, dan jual belinya menjadi tidak sah (*batil*) karena adanya rukun dan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh penjual yaitu barang yang dibeli dan penyerahan barang tersebut (lemari jati).

Jika dianalisis menurut hukum Islam mengenai jual beli lemari jati tersebut, maka jual beli semacam ini menjadi *fasakh* (rusak), karna jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana alam. Jika jual beli *fasakh*

(rusak), maka peralihan risikonya tidak ditanggung oleh penjual maupun pembeli, karna risiko yang terjadi bukan akibat/ulah dari penjual maupun pembeli melainkan akibat dari perbuatan barang itu sendiri (lemari jati). Jika barang (lemari jati) tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan, setelah serah terima dari penjual kepada pembeli, maka risikonya ditanggung oleh pembeli yang sudah menjadi penguasa dari barang tersebut. Dan jual beli semacam ini dalam hukum Islam disebut juga jual beli tangguh atau *ba'i ma'dum*.

Dalam kasus seperti ini, yaitu barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli. Tetapi tetap saja risikonya ganti rugi dari pihak yang lalai, baik pada saat terjadinya akad, maupun sesudahnya. Oleh karena itu untuk setiap kelalaian ada risiko atau tanggungan yang harus dijamin oleh pihak yang lalai yaitu dalam hal ini adalah penjual.

## 2. Jual Beli Barang Timbangan (dalam pasal 1461 KUH Perdata)

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung.

Misalnya Seseorang yang membeli buah atau membeli telur di pasar. Ibu Ira membeli buah jeruk di pasar yang pada mulanya penjual memberitahu bahwa buah jeruk tersebut akan awet sampai seminggu dan tidak akan busuk. Mendengar penjelasan dari penjual, kemudian ibu Ira membeli buah sebanyak 2kg dengan harga Rp 30.000. Kemudian tidak sampai seminggu dan baru sekitar 3 hari ternyata buah tersebut sudah busuk dan tidak bisa dimakan lagi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya risiko yang diterima ibu Ira selaku pembeli yaitu kerusakan pada buah jeruk (busuk). Dari masalah tersebut

bahwa jual beli semacam itu menurut hukum perdata peralihan risiko berada dipihak penjual ketika buah jeruk tersebut belum ditimbang, diukur dan dihitung. Tetapi ketika buah jeruk tersebut sudah ditimbang, diukur dan dihitung, maka risiko dibebankan kepada pembeli walaupun penyerahannya belum dilakukan.

Jika dianalisis menurut hukum Islam, maka jual beli semacam ini termasuk Jual Beli *Majhul* atau Jual beli yang belum diketahui kejelasan barangnya dan penjual telah berbohong kepada pembeli dengan mengatakan bahwa buah tersebut mempunyai kualitas yang baik. Dan jual beli semacam ini merupakan bentuk dari *gharar* pada sifat dan karakter obyek akad, karna tidak ada kejelasan mengenai sifat dan karakter obyek akad. Jual beli menjadi tidak sah (*Fasakh*), karena adanya syarat yang tidak terpenuhi pada saat terjadinya akad yaitu barang tersebut tidak dapat bermanfaat bagi manusia.

Menurut hukum Islam Jika sebagian barang rusak sebelum serah terima karena perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga. Namun jika setelah penyerahan barang kepada pembeli dan terlihat adanya kerusakan pada barang tersebut maka risiko dibebankan kepada pembeli, karna pembeli merupakan penguasa dari barang tersebut setelah adanya penyerahan barang.

### 3. Jual Beli Barang Tumpukan (dalam pasal 1462 KUH Perdata)

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Misalnya seseorang yang melakukan jual beli baju grosiran atau pasir.

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Ketentuan tentang risiko atas barang tumpukan juga merupakan suatu ketidakadilan, karena barang tumpukan sebenarnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460 KUH Perdata.

Misalnya seseorang membeli baju bayi secara grosiran di Tanah Abang. Ketentuannya dengan minimal membeli baju 3 buah. Ternyata baju yang dibeli secara grosiran dan satuan dipisah. Baju grosiran sudah dipisahkan berdasarkan tumpukannya masing-masing dan 1 pack baju grosiran berisi 3 buah. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pembeli memilih.

Dari peristiwa tersebut mempunyai akibat bahwa pembeli tidak bisa melihat bagaimana tipe atau kualitas secara keseluruhan baju tersebut, karna baju yang dibeli secara grosiran tidak boleh dibuka. Ketika sampai rumah pembeli baru mengetahui bahwa baju yang dibelinya sebagian rusak (sobek). Menurut hukum Perdata Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung.

Jika dianalisis menurut hukum Islam, maka jual beli semacam ini termasuk Jual Beli *Majhul* atau Jual beli yang belum diketahui kejelasan barangnya. Dan jual beli semacam ini merupakan bentuk dari *gharar* pada obyek akad, karna tidak ada kejelasan mengenai sifat dan karakter obyek akad. Jual beli menjadi tidak sah (*Fasakh*), karena adanya syarat yang tidak terpenuhi pada saat terjadinya akad yaitu barang tersebut tidak dapat bermanfaat bagi manusia.

Menurut hukum Islam Jika sebagian barang rusak sebelum serah terima karena perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga. Namun jika setelah penyerahan barang kepada pembeli dan terlihat adanya kerusakan pada barang tersebut maka risiko dibebankan kepada pembeli, karna pembeli merupakan penguasa dari barang tersebut setelah adanya penyerahan barang.

Menurut penulis, Pasal 1460-1462 KUH Perdata tidak adil karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli, yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang. Berbeda dengan Pasal 1459 KUH Perdata, menurut pasal 1459 hak milik atas barang yang diperjualbelikan tidak berpindah kepada pembeli selama barang tersebut belum diserahkan. Jadi barang yang belum diserahkan kepada pembeli termasuk dalam jaminan atau tanggungan penjual.

Risiko yang diletakkan pada penjual tersebut memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko secara otomatis dipindahkan kepada pembeli itu merupakan suatu ketidakadilan, karena pembeli bukanlah pemilik barang.

Syari'at Islam dalam bidang mu'amalah tujuan pokoknya ialah terciptanya kemaslahatan manusia. Prinsip terpenuhinya maslahat, terlindungnya aturan dan hak-hak serta meningkatnya taraf hidup. Pada prinsipnya peraturan mu'amalah dalam hukum Islam menyangkut empat hal, yaitu dilaksanakan dengan rela sama rela, mengenai suatu yang suci dan halal, tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain terlebih mempersempit peredaran ekonomi masyarakat, dan untuk tujuan yang dibenarkan syara'.

Dengan melihat empat prinsip mu'amalah tersebut, secara garis besar jual beli dalam hukum perdata ataupun dalam hukum Islam tidak ada masalah. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli maka jual beli sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, sehingga kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian jual beli dan keduanya memikul kewajiban masing-masing. Pelaksanaan jual beli dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep dan kaidah hukum Islam, jika sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditentukan dalam syariat Islam.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Menurut Ulama Fikih dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- e. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian).
- f. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
- g. barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli



h. barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati

Penanggungan risiko dapat juga memperhatikan letak dan tempat beradanya suatu barang, serta penyebab terjadinya suatu kelalaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa penanggungan atas kerusakan atau cacat barang, sebelumnya harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan barang tersebut. Tentang kerusakan barang sebelum dilakukan serah terima antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:

- a) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sedia kala. Dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
- c) Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana alam.
- d) Jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga.
- e) Jika kerusakan barang akibat perbuatan barang itu sendiri, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f) Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli

boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayaran.

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk jaminan atau garansi, maka penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya. Fuqaha berpendapat, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya.

Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (*mafhum muwafaqah*) bahwasanya nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dan keharusan kesamaan *dzahir* dengan isi. Oleh karena itu apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang cacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Menurut penulis, hakekat jual beli adalah pemenuhan akad. Demi menjunjung tinggi keadilan yang ditanamkan Islam, jelas sekali pemenuhan hak dan tanggung jawab dalam jual beli, merupakan sebuah keharusan. Keridhaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Keridhaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *an taradhim minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat dari *ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqih berbunyi:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجتہما التزماء بالتعاقد

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling di-*iltzamkan* (dipenuhi sesuai ketentuan) oleh perakadan (perjanjian)”

Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa peralihan risiko yang dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1460-1462 tidak adil, karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang atau penguasa barang. Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli menurut hukum Islam adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Demikian pula apabila barang itu rusak atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ada ganti rugi. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut adakalanya berbentuk barang ataupun uang, sesuai

kesepakatan bersama. Jaminan atau tanggungan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak.

Secara garis besar adalah bahwa dikalangan umat muslim tidak ada silang pendapat mengenai peralihan risiko jual beli yang ditanggung atau dibebankan kepada penjual sebelum penyerahan barang dan dibebankan kepada pembeli setelah penyerahan barang. Mayoritas para ulama dan Fuqaha memiliki pendapat yang sama mengenai peralihan risiko dalam jual beli. Kecuali dalam masa tanggungan atau bencana alam yang perjanjiannya sudah disepakati di awal melakukan akad yang diwujudkan dalam pilihan alternatif seperti jual beli handphone yang masih memiliki masa garansi.

Jika mengkaji secara keseluruhan, mulai dari pendapat para ahli hukum perdata dan mayoritas ulama, maka sejatinya persoalan tentang risiko ini memang sudah seadilnya dibebankan kepada penjual, karna sudah selayaknya bahwa risiko mengenai suatu barang itu dipikulkan kepada pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja ganti rugi dari pihak yang lalai jika kemungkinan terjadi kerusakan pada obyek jual beli.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan risiko dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi. Pasal 1461 KUH Perdata menjelaskan tentang peralihan risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran. Setelah barang yang diperjualbelikan ditimbang, dihitung dan diukur, maka sejak saat itu risiko beralih kepada pembeli, sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, menurut Pasal 1462 KUH Perdata yaitu sejak semula risiko dibebankan kepada pembeli.
2. Analisis hukum Islam mengenai peralihan risiko jual beli yang dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1460-1462 tidak adil, karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang atau penguasa barang. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut hukum Islam, syarat jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli

untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya. Fuqaha berpendapat, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya. Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (*mafhum muwafaqah*) bahwasanya nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

## **B. Saran-saran**

Dalam setiap transaksi jual beli, terkadang terjadi kelalaian baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Penanggungan risiko atas kerusakan atau cacat barang harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan dan siapa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Pada masa sekarang ini persaingan usaha semakin ketat penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menarik minat pembeli, di antaranya dengan memberikan jaminan keselamatan barang dalam bentuk garansi, hak pilih dalam bentuk *Khiyar* dan asuransi.

Seorang pembeli yang sudah mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya, harus pula sadar akan kewajibannya. Pembeli tidak boleh menuntut pelayanan di luar kemampuan pihak penjual. Adanya jaminan garansi merupakan bukti adanya itikad baik dari penjual. Pembeli diharapkan tidak menyalahgunakan itikad baik tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, W.Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1990)
- Ali, AM Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*, diterjemahkan Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Anagora, Pandji, *Manajemen bisnis*, cet.3, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2004)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Ed.) Cet.4* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1998)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Cholid Narbuko dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan 12, 2012,)
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,edisi ke 4, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2011)
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002)
- Kato, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013)
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Ed.1-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, alih bahasa oleh Abdulkadir Muhammad. (Bandung : PT. Alumni, 2006)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990)
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988)
- Salim, Abas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Shahatah Husein dan Siddiq Muhammad, *Transaksi dan Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani, 2005)
- Simanunsong Simanunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)

Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997)

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

\_\_\_\_\_ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1975)

\_\_\_\_\_ *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005)

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet.7 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

Syafi'i, Imam, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam 2013)

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Bumi Askara, 1999)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1984),

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, ( Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990)

**JURNAL:**

Havis Arafik, Asuransi dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal *NURANI*, VOL. 16, NO. 2, DES 2016: 25 – 50

Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Dalam jurnal *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, dalam Jurnal *Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal *Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013

**WEBSITE:**

Iman Santoso, “Gharar Dalam Fiqih Muamalah (Realita Dan Solusi)” (Online), tersedia di : <http://www.syariahonline.com/v2./3191-gharar-dalam-fiqih-muamalah-realita-dan-solusi.html> (28 Oktober 2017)




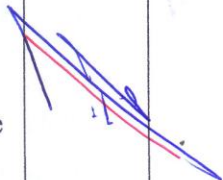

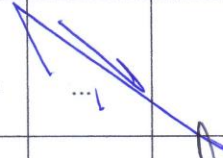



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030*

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

**NAMA : RIA ANISYA FITRI**  
**NPM : 1421030061**  
**JURUSAN : MU'AMALAH**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 1460-1462 KUH PERDATA  
TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL  
BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

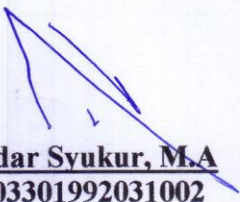
No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1	12 Juni 2017	Bimbingan ke pembimbing II BAB I (Judul, Rumusan Masalah, Latar Belakang, dan Metode Penelitian)	Perbaikan Proposal menurut catatan dan lanjut ke Bab II sampai III		
2	14 Juni 2017	Bimbingan ke pembimbing I BAB I (Judul, Rumusan Masalah, Latar Belakang, dan Metode	Perbaikan Proposal menurut catatan dan lanjut ke BAB II sampai III		
3	02 Oktober 2017	Bimbingan ke pembimbing II BAB I-III (Revisi)	Perbaikan BAB II		
4	5 Oktober 2017	Bimbingan ke pembimbing I BAB I-III (Revisi)	Perbaikan BAB II dan III		
5	14 November 2017	BAB I-III	ACC Pembimbing II		




			Lanjut ke BAB iv sampai v		
6	8 Desember 2017	BAB I	ACC Pembimbing I BAB I		
7	21 Desember 2017	BAB II-III	ACC Pembimbing I dan lanjut ke BAB iv sampai v		
8	9 Januari 2018	BAB I-V	ACC Pembimbing II		
9	9 Januari 2018	BAB I-V	ACC Pembimbing I		

Bandar Lampung, 2 Maret 2018

Pembimbing I

  
**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP.196603301992031002**

Pembimbing II

  
**Drs. Henry Iwansyah, M.A**  
**NIP. 195812071987031003**